



Hal

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xii
Instisari	xiv
Abstract	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6
1. Pelembagaan atau Institusionalisasi (<i>institusinalization</i>)	6
a. Pengertian Umum	
a.1). Pelembagaan Aktivitas	10
a.2) Pendekatan Neo Institusionalisme	12
b. Peran dan Fungsi Legislatif	16
b.1. Problema dan Prinsip-Prinsip Anggaran	18
b.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran dan fungsi Legislatif	19
c. Kode Etik Legislatif	25
d. Pelembagaan Kode Etik Legislatif	29
2. Prinsip Transparansi Dalam Kebijakan Pemerintah	31
A. Transparansi Sebagai Kode Etik	37
B. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	41
C. Pelembagaan Kode Etik Transparansi Penyusunan APBD di Legislatif	45
F. Definisi Konsep dan Definisi Operasional	46
1. Definisi Konsep	46
2. Definisi Operasional	48



G. Metode Penelitian	51
1. Jenis Penelitian	51
2. Lokasi Penelitian	52
3. Tehnik Pengumpulan Data	54
4. Jenis Data	54
5. Pengolahan dan Analisi Data	55
H. Sistematika Penulisan	55
BAB II SETING TRANSPARANSI APBD DAN DPRD KOTA PONTIANAK	58
1. Seting Transparansi APBD	58
A. Adaptasi Nilai Transparansi di Kota Pontianak	58
a. Regulasi Dalam Konteks Transparansi APBD	58
1. Pelebagaan Formal Prinsip Transparansi	59
a.1. Peraturan yang Terkait Transparansi APBD	59
a.2. Nilai Transparansi Dalam Kode Etik DPRD Kota Pontianak	61
2. Resistensi Nilai-Nilai Lama yang Dipahami Pejabat Publik	63
b. Nilai-Nilai Lokal yang Mempengaruhi Perilaku Transparansi	64
1. Masyarakat Kota Pontianak : Pluralisme dan Akulturasi Budaya	65
2. Nilai Toleransi, Kekeluargaan dan Budaya Konsumtif	68
3. Dimensi-Dimensi Kode Etik Transparansi Dalam Penyusunan APBD	71
B. Mekanisme Komunikasi Masyarakat Dengan Pemerintah : APBD	72
a. Bentuk Dialog Dalam Penyusunan APBD Kota Pontianak	72
1. Musrenbang	72
2. Rembuk Kampung	74
3. Relasi <i>Stakeholders</i> Dalam Penyusunan APBD Kota Pontianak	75
b. Peran <i>civil society</i> : Ruang Partisipasi dan Pengawasan APBD	77
1. Media Massa	77
2. Institusi Keagamaan	78
3. Lembaga Swadaya Masyaakat	79
2. Seting DPRD Kota Pontianak	80
a. Komposisi Keanggotaan Berdasarkan Pendidikan dan Masa Tugas	84
b. Fraksi-Fraksi	85
c. Alat Kelengkapan dan Sekretariat DPRD	87
d. Program, Kegiatan dan Produk DPRD	97
e. Rapat Paripurna Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 Kota Pontianak	102
1). Mekanisme Rapat Paripurna dan Kehadiran Anggota DPRD	105
2). Dokumentasi dan Publikasi	111

A. Upaya dan Instrumentasi Pelebagaan Kode Etik Transparansi di DPRD	115
1. Program Kerja Peningkatan Sumber daya Anggota DPRD	117
2. Legalitas Kode Etik dan Tata Tertib DPRD	133
3. Penyediaan Dana dan Sarana Dokumentasi dan Publikasi	142
B. Derajat Kedalaman dan Keluasan Pelebagaan Kode Etik Transparansi Dalam Penyusunan APBD di DPRD Kota Pontianak	148
1. Kedalaman Pelebagaan Kode Etik Transparansi	149
1. Standar Perilaku Kode Etik Transparansi	149
a. Pemahaman dan Ketaatan Kode Etik DPRD	150
1) Persepsi Anggota DPRD Terhadap Kode Etik DPRD	150
2) Persepsi Anggota DPRD terhadap Peran dan Fungsi Badan Kehormatan DPRD Kota Pontianak	155
b. Pemahaman dan Ketaatan pada Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja	158
1. Kemampuan Menyusun Program Kerja yang Efektif Dan Efisien	159
2. Pengalaman Menyusun APBD	162
3. Motivasi Menyusun APBD	167
2. Mekanisme dan Prosedur Debat Anggaran yang Transparan	170
a. Disiplin Kehadiran Mengikuti Rapat Paripurna	170
b. Sikap Menyatakan Pendapat Dalam Rapat paripurna	174
c. Pengambilan Keputusan Dalam Rapat Paripurna	177
3. Akses Informasi Publik Dalam Penyusunan APBD	180
a. Dokumentasi dan Informasi	181
b. Publikasi dan Prosedur Pelayanan Informasi	182
2. Keluasan Pelebagaan Kode Etik Transparansi	186
1. Komitmen Norma Transparansi oleh <i>Stakeholders</i>	187
a. Kesamaan Pemahaman Kode Etik Transparansi Antar <i>Stakeholders</i>	187
b. Kesamaan Pemahaman Prinsip Anggran Berbasis Kinerja	190
2. Mekanisme Rapat Paripurna yang Transparan dan akuntabel	192
a. Proses Rapat Paripurna APBD yang Terbuka	192
b. Proses Pengambilan Keputusan yang Akuntabel	195
3. Sistem Dokumentasi dan Informasi yang Mudah dan Cepat	197
a. Standar dan Prosedur Pelayanan Informasi APBD	197
b. Akses Informasi yang Cepat dan Mudah	198



C. Kenda Pontianak	201
1. Kurangnya Pemahaman Kode Etik Transparansi	201
2. Lemahnya Peran dan Fungsi Badan Kehormatan	203
3. Lemahnya Dukungan Lingkungan Dalam Transparansi	204
a. Menipisnya Nilai-Nilai Kejujuran dan Tanggungjawab	204
b. Kurangnya Aktivitas Advokasi Transparsansi	205
c. Lemahnya Penegakan Hukum	205

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU ANGGOTA DPRD DALAM PENYUSUNAN APBD KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2009 207

A. Pengantar	207
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Transparansi Anggota DPRD Dalam Rapat Paripurna APBD di DPRD Kota Pontianak	208
1. Logika Kepentingan : Konflik Kepentingan finansial dan Jabatan Politik	209
2. Logika Kepantasan : Budaya Konsumtif, Dermawan dan Pemborosan	213
3. Logika Kesejarahan : Dominasi Birokrat dan Rahasia Negara	217

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 221

A. Kesimpulan	221
B. Saran	223

Daftar pustaka
Lampiran

	Hal
TABEL 1 : PILAR-PILAR PELEMBAGAAN INSTITUSI	30
TABEL 2 : PEROLEHAN KURSI DPRD KOTA PONTIANAK BERDASARKAN DAERAH PEMILIHAN	67
TABEL 3 : PROPORSI ANGGOTA DPRD KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PARTAI POLITIK	82
TABEL 4 : NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD KOTA PONTIANAK MASA JABATAN 2004-2009	83
TABEL 5 : KOMPOSISI KEANGGOTAAN DPRD KOTA PONTIANAK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	84
TABEL 6 : KOMPOSISI KEANGGOTAAN DPRD KOTA PONTIANAK BERDASARKAN MASA BHAKTI	85
TABEL 7 : FRAKSI-FRAKSI di DPRD KOTA PONTIANAK	87
TABEL 8 : KOMPOSISI KOMISI DPRD KOTA PONTIANAK DAN KEANGGOTANNYA MASA JABATAN 2008-2009	89
TABEL 9 : PANITIA MUSYAWARAH DPRD KOTA PONTIANAK MASA KEANGGOTAAN 2008-2009	90
TABEL 10 : PANITIA ANGGARAN DPRD KOTA PONTIANAK MASA KEANGGOTAAN 2008-2009	92
TABEL 11 : BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA PONTIANAK MASA KEANGGOTAAN 2005-2009	93
TABEL 12 : PANITIA LEGISLASI DPRD KOTA PONTIANAK MASA KEANGGOTAAN 2008-2009	95
TABEL 13 : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPRD KOTA PONTIANAK TA. 2009	98-99
TABEL 14 : PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS DPRD KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2009	100
TABEL 15 : RINGKASAN APBD KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2009	108



TABEL 16

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Kode etik transparansi dalam penyusunan APBD Kota Pontianak :: Studi tentang pelebagaan kode etik transparansi dalam penyusunan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2009 di DPRD Kota Pontianak
REDHO, Muhammad, Abdul Gaffar Karim, MA
Universitas Gadjah Mada, 2009 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2009

109

TABEL 17

**: TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA FRAKSI DPRD
MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA PENYUSUNAN APBD
KOTA PONTIANAK T.A. 2009**

111